

# SINERGISITAS KODIM 0309/SOLOK DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBINAAN KEMAMPUAN MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI SUMATERA BARAT

*Synergy between Kodim 0309/Solok and Local Government in Developing the Capacity to Prevent Social Conflict in West Sumatra*

**Sapta Raharja<sup>1</sup>, Robby Moehammad Taufik<sup>2</sup>, Haposan Simatupang<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort – 8, Fakultas Strategi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan, Indonesia.

email penulis/koresponden : saptaraharja.kav04@gmail.com

**Abstract.** *This study analyzes the synergy between the Military District Command (Kodim) 0309/Solok and the Regional Government of Solok City in efforts to prevent social conflict. Employing a qualitative approach with a case study design, the research enables an in-depth exploration of the complex and dynamic processes underpinning such synergy. Data collection was conducted through triangulation, and data analysis was performed inductively. The study was carried out in Solok Regency and at relevant regional government offices such as the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) from January to July 2025. The findings reveal that the synergy between Kodim 0309/Solok and the Regional Government operates at a high level, formally institutionalized through active membership in the Regional Leadership Communication Forum (Forkopimda) and the Integrated Team for Social Conflict Management of Solok City. Functional synergy is also evident in joint participation in early detection, mediation facilitation, and social guidance initiatives. Kodim's role extends beyond security functions, encompassing strategic contributions to decision-making and the handling of sensitive issues, such as land disputes and the conversion of productive rice fields. This approach prioritizes persuasive and humanistic measures before resorting to law enforcement. Supporting factors for this synergy include formal legitimacy through membership in Forkopimda and the Integrated Team, a shared vision for maintaining regional stability, and the strategic leadership role of the Kodim Commander in coordinating policies and actions. The success of this synergy enhances the effectiveness of conflict prevention, strengthens social resilience, improves resource efficiency, and fosters public trust in state institutions. Conversely, the primary inhibiting factors are the spread of misinformation and social polarization, which can disrupt information management and delay coordinated responses. The study concludes that synergy is a strategic necessity for fostering a stable and harmonious society in Solok, integrating structural, cultural, and social approaches to achieve sustainable social peace.*

**Keywords:** *Sinergy, Kodim, Local Government, Social Conflict, Conflict Prevention*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis sinergisitas antara Komando Distrik Militer (Kodim) 0309/Solok dan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam upaya mencegah konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses sinergisitas yang kompleks dan dinamis. Metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data secara induktif. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Solok dan kantor instansi pemerintah daerah terkait seperti Kantor Kesbangpol dan Satpol PP, dilaksanakan dari Januari hingga Juli 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergisitas antara Kodim 0309/Solok dan Pemerintah Daerah berada pada tingkat yang tinggi dan terwujud secara formal melalui keanggotaan aktif dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Solok. Sinergi fungsional juga terlihat melalui partisipasi dalam deteksi dini, fasilitasi mediasi, dan pembinaan sosial. Peran Kodim tidak hanya terbatas pada fungsi pengamanan, tetapi juga mencakup kontribusi strategis dalam pengambilan keputusan dan penanganan isu-isu sensitif seperti sengketa lahan dan penimbunan sawah produktif. Pendekatan ini mengutamakan cara persuasif dan humanis sebelum penegakan hukum. Faktor pendukung sinergisitas mencakup legalitas formal melalui keanggotaan Forkopimda dan Tim Terpadu, kesamaan visi untuk menjaga stabilitas daerah, serta peran strategis kepemimpinan Komandan Kodim dalam mengoordinasikan kebijakan dan tindakan. Keberhasilan sinergi ini meningkatkan efektivitas pencegahan konflik, memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah penyebaran hoaks dan polarisasi yang dapat mengganggu manajemen informasi dan memperlambat respons terkoordinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergisitas adalah keharusan strategis untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis di Solok, dengan menggabungkan pendekatan struktural, kultural, dan sosial demi perdamaian sosial yang berkelanjutan

**Kata kunci:** Sinergisitas, Kodim, Pemerintah Daerah, Konflik Sosial, Pencegahan Konflik

## 1. Pendahuluan

Konflik sosial merupakan fenomena kompleks yang senantiasa hadir dalam dinamika masyarakat multikultural, termasuk di Sumatera Barat. Sebagai provinsi yang identik dengan masyarakat Minangkabau, daerah ini memiliki sistem sosial-budaya yang kuat dengan nilai adat dan agama sebagai fondasi utama. Namun, dalam dua dekade terakhir, laju modernisasi dan perubahan sosial telah memperlihatkan paradoks, di mana nilai tradisional yang semestinya memperkuat kohesi sosial justru kerap berbenturan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan perebutan sumber daya. Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Barat (2022) menunjukkan bahwa dalam kurun

lima tahun terakhir terdapat sedikitnya 47 potensi konflik yang teridentifikasi di berbagai kabupaten/kota. Potensi konflik tersebut sebagian besar dipicu oleh isu tanah, proyek pembangunan, dan gesekan antarkelompok pemuda. Secara khusus, Kabupaten Solok mencatat enam potensi konflik (12,8%) dengan kategori dominan agraria, politik lokal, dan identitas, sedangkan Kota Solok mencatat tiga potensi konflik (6,4%) dengan kategori dominan pemuda, proyek pembangunan, dan identitas. Jika ditinjau lebih mendalam, konflik berbasis identitas muncul di kedua wilayah dan menyumbang 33,3% dari total konflik, menjadikannya sumber konflik yang paling dominan.

Distribusi konflik ini mencerminkan karakteristik wilayah yang berbeda (Halkis, 2024). Kota Solok sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi menghadapi tantangan urban berupa mobilitas sosial tinggi dan persaingan sumber daya perkotaan. Sebaliknya, Kabupaten Solok yang bercorak agraris lebih rentan terhadap konflik terkait tanah ulayat, sengketa agraria, dan isu politik lokal. Lanskap konflik ini menunjukkan bahwa permasalahan di Solok tidak dapat dipahami semata sebagai gesekan horizontal masyarakat, melainkan juga melibatkan faktor struktural, kultural, dan situasional. Dalam konteks penanganan konflik, Kodim 0309/Solok memiliki peran strategis. Kodim ini berada di bawah Korem 032/Wirabraja dan bertugas melaksanakan pembinaan teritorial (Binter) di wilayah Kota dan Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki mandat operasi militer selain perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (UU TNI, 2004, Pasal 7 ayat 2). Melalui fungsi Binter, Kodim melaksanakan berbagai kegiatan seperti komunikasi sosial (Komsos), bakti TNI, dan pembinaan ketahanan wilayah (Kodiklat TNI AD, 2018). Dengan jaringan Babinsa yang langsung berinteraksi dengan masyarakat akar rumput, Kodim berpotensi menjadi aktor penting dalam deteksi dini konflik sosial.

Namun demikian, efektivitas peran Kodim tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat merupakan kewenangan utama pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergisitas antara Kodim 0309/Solok dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan konflik yang komprehensif. Kajian Bappenas (2025) menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial membutuhkan pendekatan multiaktor karena sifat konflik yang multidimensi. Kodim sebagai representasi negara di bidang pertahanan non-militer dan pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif di tingkat lokal perlu bekerja sama dalam pemetaan sosial, deteksi dini, respons cepat, serta penguatan forum komunikasi lintas elemen masyarakat. Beberapa praktik sinergi sudah terlihat, misalnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau pembentukan satgas bersama pada momentum tertentu, seperti pemilu atau perayaan hari besar. Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh (Ndzendze & Adunimay, 2024), mekanisme koordinasi tersebut masih bersifat insidental dan belum terlembaga secara permanen.

Lebih jauh lagi, tantangan pengelolaan konflik sosial dewasa ini semakin kompleks dengan hadirnya faktor eksternal berupa arus informasi digital yang tidak terkendali. LIPI (2020) menunjukkan bahwa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial menjadi salah satu pemicu utama konflik horizontal di Indonesia (Yusnaldi, 2022). Fenomena ini juga tampak di Solok, di mana isu lokal dapat dengan cepat tereskalasi menjadi konflik yang lebih luas akibat polarisasi opini dan provokasi daring. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi Kodim dan pemerintah daerah menjadi semakin penting: Kodim dengan fungsi penggalangan masyarakat melalui Babinsa, dan pemerintah daerah melalui penguatan literasi digital serta kapasitas kelembagaan lokal. Dengan demikian, sinergi antara Kodim 0309/Solok dan pemerintah daerah dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk kerja sama teknis, melainkan juga sebagai fondasi pembentukan sistem pertahanan non-militer yang tangguh, sejalan dengan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Teori Sinergi**

Sinergi merupakan konsep fundamental dalam kajian manajemen, organisasi, dan ilmu sosial. Secara umum, sinergi dipahami sebagai interaksi antar entitas yang menghasilkan keluaran lebih besar daripada kontribusi individual masing-masing pihak. Fenomena ini sering digambarkan sebagai “dua ditambah dua menjadi lima” (Covey, 1989). Dalam tata kelola kolaboratif, sinergi dipandang sebagai kemampuan kolektif yang muncul dari interaksi partisipatif lintas aktor (Ansell & Gash, 2007). Huxham dan Vangen (2005) menegaskan bahwa sinergi dalam kemitraan strategis melahirkan collaborative advantage, yakni capaian yang tidak mungkin diraih oleh satu pihak secara tunggal. Porter (1985) menambahkan bahwa sinergi dapat menghindarkan duplikasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta menghasilkan keputusan yang lebih legitim dan berkelanjutan.

## **2.2. Teori Pembinaan**

Konsep pembinaan merujuk pada upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok. (Basheer & Elagib, 2024) mendefinisikan pembinaan sebagai proses peningkatan kemampuan dan kinerja melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan. Perspektif psikologi sosial menegaskan bahwa pembinaan juga mencakup pembentukan karakter dan nilai (Chattu dkk., 2020). Dalam ranah pemerintahan, pembinaan ditempatkan sebagai instrumen koordinasi dan pengawasan antar tingkatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan tidak hanya berfungsi mengawasi, tetapi juga mengarahkan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

## **2.3. Teori Pencegahan Konflik**

Pencegahan konflik menjadi strategi utama untuk menghentikan potensi eskalasi sejak dini. Lund (1996) melalui konsep preventive diplomacy menegaskan pentingnya intervensi pada tahap awal melalui mediasi, peringatan dini, dan negosiasi. Wallenstein (2023) membedakan antara pencegahan struktural yang berfokus pada ketidakadilan jangka panjang dengan pencegahan operasional yang bersifat responsif terhadap potensi krisis. Galtung (1969) memperkaya kerangka ini dengan konsep kekerasan struktural dan

kultural, yang menekankan perlunya transformasi sosial. Lederach (1997) menekankan peran masyarakat sipil pada tingkat akar rumput dalam membangun infrastruktur perdamaian sebagai prasyarat pencegahan konflik yang berkelanjutan.

#### **2.4. Teori Keamanan Manusia**

Paradigma keamanan manusia menggeser fokus keamanan dari negara ke individu. UNDP (1994) merumuskan tujuh dimensi keamanan manusia, mencakup aspek ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Konsep ini kemudian berkembang dengan menekankan dua pilar utama, yaitu perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerment) (JICA, 2024). Studi kontemporer menunjukkan relevansi keamanan manusia terhadap isu modern, seperti jebakan utang digital yang mengancam keamanan ekonomi individu (Yu dkk., 2024). Meskipun menuai kritik dari perspektif realis, keamanan manusia tetap signifikan sebagai kerangka analisis atas ancaman non-militer (Naiga, 2023)

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan aktor masyarakat dalam konteks pencegahan maupun penanganan konflik. Andayani (2025) menyoroti efektivitas koordinasi dan komunikasi antara TNI dan Pemda dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, yang menghasilkan respons cepat, terarah, dan komprehensif. Penelitian Ridwan (2022) menekankan keterlibatan tokoh masyarakat dalam meredam potensi konflik horizontal di Kalimantan Barat, menunjukkan peran signifikan aktor non-negara dalam membangun sistem peringatan dini. Sementara itu, Purwanto (2021) mengidentifikasi hambatan implementasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial di tingkat daerah, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya komitmen politik, yang secara langsung mengurangi efektivitas sinergitas antara Pemda dan TNI.

Penelitian kontemporer menyoroti integrasi teknologi dalam memperkuat sinergi. Sungudi, Uksan, dan Siahaan (2024) menekankan pentingnya penguatan infrastruktur

digital, literasi, dan keamanan siber dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, meskipun masih dihadapkan pada hambatan birokrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Nugraha, Alexandra, Adriyanto, dan Saragih (2023) menelaah sinergi antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga status zero conflict SARA. Studi ini menekankan keberhasilan melalui edukasi antariman, operasi gabungan, serta fasilitas toleransi, meskipun tantangan berupa ego sektoral, ketimpangan kesejahteraan, dan isu hoaks masih signifikan.

Selain itu, Subagyo dan Rusfiana (2018) menunjukkan bahwa sinergi lintas lembaga di Kota Tarakan melalui Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Lurah mampu menciptakan sistem deteksi dini dan rehabilitasi pasca-konflik, namun peran aktif masyarakat masih kurang. Subagyo et al. (2021) kemudian menegaskan peran Kodim 0506/Tangerang dalam penguatan keamanan Pilkada serentak 2020 melalui pembinaan teritorial dan koordinasi lintas sektor, yang memperlihatkan peran non-militer TNI dalam menjaga keamanan demokrasi lokal. Penelitian lanjutan oleh Sungudi, Uksan, dan Siahaan (2024) menambahkan rekomendasi strategi berupa penyusunan rencana aksi bersama, standardisasi SOP, hingga kolaborasi riset teknologi dalam memperkuat ketahanan wilayah di era digital, meskipun keterbatasan anggaran, birokrasi, dan ketimpangan sumber daya tetap menjadi hambatan yang signifikan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang melalui serangkaian tahapan sistematis yang disesuaikan dengan desain riset kualitatif. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang kompleks, dinamis, serta kontekstual. Desain ini memungkinkan peneliti menelaah proses, dinamika interaksi, serta praktik aktual yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan pada lokasi strategis yang dinilai relevan dengan fokus penelitian, seperti instansi pemerintah, lembaga terkait, maupun unit kerja yang mendukung akurasi data. Subjek

penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara selektif berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan relevansinya terhadap isu penelitian. Sebanyak sepuluh narasumber kunci, terdiri atas pakar dan pembuat kebijakan, diwawancarai secara mendalam untuk memperoleh informasi komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1). Wawancara mendalam (in-depth interview), untuk menggali secara rinci pengalaman, persepsi, serta pandangan informan mengenai fenomena yang diteliti. (2). Studi dokumentasi, dengan menelaah dokumen strategis, arsip kelembagaan, serta regulasi yang berkaitan langsung dengan isu penelitian guna memperkuat dan memvalidasi temuan wawancara. (3). Observasi terbatas, yang difokuskan pada kegiatan atau praktik relevan untuk menangkap dinamika empiris di lapangan.

Data yang terkumpul ditranskripsikan, diklasifikasikan, serta diorganisasikan secara sistematis. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, serta tema utama yang muncul. Proses analisis dilaksanakan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan pengolahan data berlangsung secara berulang dan mendalam.

Hasil analisis tidak hanya dideskripsikan secara naratif, tetapi juga diinterpretasikan secara kritis untuk menyingkap makna di balik temuan. Interpretasi tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi kelebihan maupun keterbatasan fenomena yang dikaji. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian dirumuskan secara holistik dan digunakan sebagai landasan penyusunan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Kodim 0309/Solok merupakan salah satu aktor strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Solok. Sebagai bagian integral

dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peran Kodim tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan, melainkan juga mencakup penguatan ketahanan sosial melalui pendekatan teritorial. Dalam berbagai forum Forkopimda, Kodim secara aktif memberikan kontribusi pemikiran dan dukungan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Solok berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat adat dan keagamaan. Kodim 0309/Solok, bersama dengan Wali Kota, Kapolres, Ketua DPRD, Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terlibat secara aktif dalam forum tersebut. Kolaborasi ini menjadi cerminan nyata dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik.

Salah satu bentuk konkret dari sinergisitas tersebut dapat dilihat dalam penanganan isu strategis yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti sengketa tanah di kawasan GOR Marah Adin. Kodim, bersama dengan Forkopimda, turut mendukung langkah mediasi dan penegakan hukum yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah. Upaya ini dilakukan guna menghindari gesekan antara masyarakat dan pemerintah serta untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu, Kodim 0309/Solok juga menunjukkan peran aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan. Dalam rapat Forkopimda bulan Maret 2025, Kodim menyatakan kesiapan dalam mendukung pengamanan kegiatan takbiran, salat Idulfitri, serta acara keagamaan lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib selama perayaan, serta mencegah potensi gangguan keamanan.

Sinergi antara Kodim dan Pemerintah Daerah juga tercermin dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, seperti balapan liar dan tawuran. Pemerintah Kota,

bersama unsur TNI dan Polri, merumuskan kebijakan preventif dengan pendekatan fasilitatif, di antaranya melalui wacana pembangunan sirkuit mini di sekitar GOR Marah Adin. Kodim mendukung inisiatif ini sebagai strategi untuk menyalurkan energi generasi muda ke arah yang lebih positif, sekaligus meminimalisasi potensi konflik sosial yang bersumber dari aktivitas remaja. Keterlibatan Kodim 0309/Solok juga terlembagakan melalui keikutsertaannya dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Solok. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota dan terdiri dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. Tim Terpadu memiliki mandat untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik dan menyusun langkah-langkah intervensi cepat guna meredam eskalasi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat.

Kodim 0309/Solok, melalui pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter), juga aktif membina hubungan harmonis dengan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Program seperti komunikasi sosial, karya bakti, dan pendampingan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara. Pendekatan ini sekaligus memperkuat solidaritas sosial yang menjadi modal utama dalam mencegah terjadinya konflik horizontal. Dalam setiap forum Forkopimda, Kodim tidak hanya memberikan pandangan dari aspek keamanan, tetapi juga mendorong pendekatan humanis dalam penyelesaian persoalan sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian, bahwa penegakan hukum merupakan langkah terakhir, sementara pendekatan persuasif dan pembinaan sosial menjadi pilihan utama. Keselarasan visi ini menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan

Forum Forkopimda secara strategis menjadi ruang dialog dan koordinasi yang efektif untuk menyatukan visi keamanan dan pembangunan daerah, di mana Kodim 0309/Solok berperan aktif dalam menyampaikan hasil analisis kondisi lapangan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam forum ini pula, Kodim turut membahas dan mendampingi penyelesaian berbagai isu strategis berbasis wilayah,

seperti sengketa tanah di kawasan GOR Marah Adin yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, serta penimbunan sawah produktif oleh masyarakat yang dapat memicu ketegangan antara warga dan pemerintah. Kolaborasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang kolektif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial lokal.

No	Jenis Konflik Strategis	Potensi Konflik (Skala 1–10)	Pihak yang Terlibat
1	Sengketa tanah GOR Marah Adin	9	Pemerintah Kota, warga pemilik lahan
2	Penimbunan sawah produktif di Tanah Garam	7	Warga pemilik sawah, Pemkot

Kodim 0309/Solok memegang peran penting dalam membina stabilitas sosial di Kota Solok, tidak hanya dalam konteks pertahanan negara, tetapi juga dalam penyelesaian isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Keterlibatan Kodim dalam berbagai forum koordinasi bersama Pemerintah Daerah mencerminkan adanya sinergisitas lintas sektoral yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, yakni terciptanya ketertiban dan keamanan wilayah. Peran ini menjadi semakin penting ketika isu-isu yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan ruang serta lahan yang bersifat sensitif. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Kodim 0309/Solok adalah sengketa tanah di sekitar kawasan GOR Marah Adin. Sengketa ini memiliki potensi besar menimbulkan konflik horizontal, karena melibatkan klaim kepemilikan oleh warga yang bertentangan dengan kebijakan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah. Kodim, melalui forum Forkopimda dan pertemuan lintas instansi, turut serta dalam memfasilitasi proses mediasi serta mendorong penyelesaian yang berkeadilan. Pendekatan teritorial yang dilakukan oleh Kodim memungkinkan adanya pemetaan sosial terhadap pihak-pihak

yang terlibat, sehingga strategi penyelesaian dapat lebih tepat sasaran dan menghindari eskalasi konflik.

Selain sengketa tanah, Kodim juga turut serta dalam pembahasan terkait aktivitas penimbunan sawah produktif oleh masyarakat, khususnya di wilayah Tanah Garam. Aktivitas ini menimbulkan keresahan di kalangan pemerintah karena menyangkut alih fungsi lahan pertanian yang berdampak langsung pada ketahanan pangan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kodim berperan dalam memberikan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat melalui Babinsa, agar proses penyadaran dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Tindakan preventif ini mencerminkan fungsi pembinaan teritorial yang diemban oleh Kodim sebagai bagian dari sistem keamanan nasional di tingkat lokal. Kehadiran Kodim dalam proses penyelesaian isu-isu tersebut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi konflik melalui intelijen teritorial dan komunikasi sosial. Dengan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat serta institusi pemerintah, Kodim dapat berperan sebagai penghubung antara kepentingan warga dan arah kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Kodim bukan hanya aktor militer, tetapi juga agen stabilisasi sosial yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, keterlibatan Kodim 0309/Solok dalam penanganan isu-isu strategis di Kota Solok mencerminkan model sinergi yang konstruktif antara aparat teritorial dan pemerintah daerah. Kehadiran dan partisipasi aktif Kodim dalam menyikapi permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial menjadi wujud konkret dari upaya preventif yang berbasis wilayah dan berorientasi pada perdamaian sosial. Model kolaboratif semacam ini menjadi praktik baik dalam tata kelola keamanan lokal yang partisipatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan Mei 2025, Kompol Sugianto menegaskan bahwa sinergi antara Polres, Kodim 0309/Solok, dan Satpol PP merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Solok, khususnya pada

momentum-momentum keagamaan dan sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Ia menjelaskan: *“Kami terus membangun koordinasi rutin, terutama menjelang hari besar seperti Idulfitri. Dalam pelaksanaan pengamanan takbiran dan salat Ied, keterlibatan Kodim dan Satpol PP sangat menentukan keberhasilan. Kami menyusun rencana pengamanan bersama, termasuk pengaturan lalu lintas dan antisipasi gangguan ketertiban umum di titik-titik strategis.”*

Kompol Sugianto juga menekankan bahwa pencegahan konflik sosial di kalangan remaja menjadi perhatian khusus dalam agenda patroli terpadu: *“Program ‘0 tawuran dan balap liar’ sudah kami laksanakan secara berkelanjutan. Kodim dan Satpol PP turun bersama dalam delapan kali operasi besar sepanjang 2024 hingga awal 2025. Operasi ini tidak hanya menekan angka kejadian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan masyarakat secara langsung.”*

Dalam wawancara terpisah, Zulkarnaini selaku Kepala Satpol PP Kota Solok mengungkapkan bahwa pendekatan kolaboratif dengan Kodim dan Polres menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Ia menuturkan: *“Satpol PP tentu tidak bisa bekerja sendiri. Untuk kegiatan besar seperti malam takbiran dan salat Ied, kami sangat bergantung pada dukungan personel Kodim dan Polres. Tugas kami lebih pada pengawasan dan penertiban di lapangan, tetapi kekuatan koordinasi itulah yang membuat semua berjalan tertib.”*

Ia juga menggarisbawahi bahwa dalam pencegahan konflik sosial remaja, edukasi dan keterlibatan komunitas sangat diutamakan: *“Kami bersama Kodim dan Polres aktif turun ke lapangan, menyentuh titik-titik rawan seperti area balap liar. Tapi kami tidak hanya melakukan razia. Kami ajak remaja berdialog, dan kami gandeng sekolah serta tokoh masyarakat. Ini bagian dari pendekatan non-represif agar anak-anak tidak merasa ditekan, tapi dibina.”*

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sinergisitas antar instansi dalam pencegahan konflik sosial melalui penegakan ketertiban di Kota Solok berjalan secara terkoordinasi dan berbasis pada pendekatan humanis. Kolaborasi antara Polres Solok Kota, Kodim 0309/Solok, dan Satpol PP bukan hanya dalam bentuk operasi keamanan,

tetapi juga pada ranah pembinaan sosial dan komunikasi publik. Strategi ini diyakini efektif dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kota Solok secara struktural telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melalui Surat Keputusan Wali Kota. Tim ini terdiri atas unsur TNI dari Kodim 0309/Solok, Polri dari Polres Solok Kota, serta unsur pemerintahan daerah seperti Badan Kesbangpol, camat, dan tokoh masyarakat. Tim ini berfungsi sebagai instrumen teknis yang menangani isu-isu sosial yang berpotensi menimbulkan konflik, sebagaimana tercantum dalam SK Timdu tahun 2024 Fungsi utama tim adalah melakukan pemetaan potensi konflik, baik yang bersifat laten maupun aktual, dengan memanfaatkan informasi dari intelijen kewilayahan dan laporan masyarakat. Rapat Forkopimda tanggal 10 Februari dan 25 Maret 2025 menunjukkan bahwa sinergisitas lintas sektor menjadi pendekatan utama dalam menyusun strategi intervensi dini terhadap konflik sosial. Kodim 0309/Solok dan Polres menjadi dua aktor utama yang bertugas melakukan deteksi dini melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta menyampaikan temuan tersebut ke dalam forum Forkopimda untuk ditindaklanjuti secara kolektif Forum ini menjadi sarana strategis dalam merumuskan respons terpadu yang bersifat preventif dan kolaboratif.

Selain perencanaan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi konflik menjadi elemen penting dari kerja Tim Terpadu. Dalam beberapa kasus seperti penimbunan sawah produktif dan sengketa tanah di kawasan GOR Marah Adin, peran Forkopimda sangat menonjol dalam meredakan ketegangan melalui dialog terbuka dan pendekatan kekeluargaan. Kodim 0309/Solok, dalam konteks ini, tidak hanya bertindak sebagai pengamanan tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi antara warga dan Pemerintah Daerah. Peran ini diperkuat oleh kehadiran tokoh masyarakat seperti LKAAM dan Bundo Kandung yang memiliki legitimasi kultural di tengah Masyarakat. Khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Polres Solok Kota dan Kodim 0309/Solok menunjukkan kesamaan pandangan, yakni bahwa penegakan hukum harus menjadi upaya terakhir setelah

pendekatan sosial dan persuasif dilakukan. Hal ini tercermin dalam arahan Kapolres dan Kodim dalam forum Forkopimda serta praktik di lapangan seperti patroli malam Ramadhan, pengamanan takbiran, serta kampanye "0 tawuran dan balap liar". Pendekatan humanis ini memungkinkan aparat keamanan membina hubungan sosial yang lebih kuat dengan masyarakat, menghindari eskalasi konflik, dan menjaga stabilitas sosial secara berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa Kodim 0309/Solok memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Solok, tidak hanya dalam dimensi pertahanan, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam forum koordinasi lintas sektor seperti Forkopimda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sinergis yang melibatkan Kodim, Polres, Satpol PP, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat berhasil menciptakan mekanisme pencegahan serta penanganan konflik sosial yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian. Temuan utama penelitian ini menggarisbawahi tiga hal. Pertama, sinergi lintas sektor memungkinkan pengambilan keputusan yang kolektif dan responsif terhadap dinamika konflik lokal, seperti sengketa tanah GOR Marah Adin dan penimbunan sawah produktif di Tanah Garam. Kedua, keterlibatan Kodim melalui pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter) memperkuat modal sosial, membangun kepercayaan publik, serta mendorong penyelesaian konflik dengan cara persuasif dan edukatif. Ketiga, model koordinasi rutin dalam konteks kegiatan keagamaan dan sosial mampu mereduksi potensi kerawanan sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengungkap bentuk sinergisitas Kodim 0309/Solok dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas sosial telah tercapai. Kontribusi teoretis studi ini terletak pada penguatan perspektif bahwa aparat teritorial dapat berfungsi sebagai agen stabilisasi sosial, bukan semata aktor militer. Sementara itu, kontribusi praktisnya tercermin pada model kolaboratif yang dapat direplikasi di daerah

lain dengan karakteristik sosial yang serupa. Sebagai tindak lanjut, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis perbandingan praktik sinergi keamanan lintas daerah, atau pada evaluasi efektivitas jangka panjang dari pendekatan humanis dalam mencegah konflik horizontal. Hal ini penting untuk memperkaya literatur tentang tata kelola keamanan lokal sekaligus memberikan masukan bagi perumusan kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

#### Daftar Pustaka (APA Style)

- Basheer, M., & Elagib, N. A. (2024). Armed conflict as a catalyst for increasing flood risk. *Environmental Research Letters*, 19(10). Scopus. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad6fb6>
- Chattu, V. K., Knight, A., Reddy, K. S., & Aginam, O. (2020). Corrected and republished: Global health diplomacy fingerprints on human security: Global health diplomacy fingerprints on human security. *International Journal of Preventive Medicine*, 11(1). Scopus. <https://doi.org/10.4103/2008-7802.279163>
- Danso, K., & Aning, K. (2022). African experiences and alternativity in International Relations theorizing about security. *International Affairs*, 98(1), 67–83. Scopus. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab204>
- Halkis, M., & Waldani, I. (2024). Dissensus and transversality in Indigenous struggles: A critical ecosophical analysis of the defence of Ulayat rights in Indonesia. *Knowledge Cultures*, 12(3): 36-53. <https://doi.org/10.22381/kc12320242>
- He, Q., Pang, X., He, Y., Xu, Y., & Connolly, M. H. (2025). Agricultural Geography and International Water Conflict: Evidence from Remotely Sensed Data. *International Studies Quarterly*, 69(3). Scopus. <https://doi.org/10.1093/isq/sqaf048>
- Liebig, T., Pacillo, G., Osorio, D., & Läderach, P. (2022). Food systems science for peace and security: Is research for development key for achieving systematic change? *World Development Sustainability*, 1. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2022.100004>

- Naiga, R. (2023). Determinants of Conflicts in Local Water Governance and Implications for Peacebuilding in Water Development. *Peace and Conflict Studies*, 29(2). Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85163118797&partnerID=40&md5=870cc63b973d1bc0aa24e9228c5e632a>
- Ndzendze, B., & Adunimay, A. W. (2024). *An appraisal of the AU's Peace and Security Council, 2003-2022* (hlm. 225–242). Taylor and Francis; Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781003521334-14>
- Oswald-Spring, Ú. (2023). Decolonizing peace with a gender perspective. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 15(1), 23–38. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2022-0678>
- Simo, A., Mustafa, S., & Mousa, K. M. (2025). Exploring Conflict Escalation: Power Imbalance, Alliances, Diplomacy, Media, and Big Data in a Multipolar World. *Journalism and Media*, 6(1). Scopus. <https://doi.org/10.3390/journalmedia6010043>
- Sun, S. (2021). Global Science and Technology Governance: Impetus, Challenges, and Prospects. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 7(1), 61–78. Scopus. <https://doi.org/10.1142/S2377740020500244>
- Yu, R., Zhang, W., Zhang, F., Wang, L., Zhang, C., Zhao, D., & Huang, X. (2024). Enlightenment on the global mining policy changes in 2023. *China Mining Magazine*, 33(2), 29–35. Scopus. <https://doi.org/10.12075/j.issn.1004-4051.20240174>
- Yusnaldi, Albert Mamahit, D., Supartono, & Mhd Halkis. (2022). *Civil-military coordination of national resources management in local communities, Indonesia case study*. *Journal of Scientific Papers Social Development and Security*, 12(1), 95-103. <https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.10>